

KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI PENGENDALI INFLASI DAN NILAI TUKAR

Heri Budi Harsono¹, Yadi Janwri², Muhammad Hasanuddin³

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung¹²³

Budiheri1994@gmail.com

ABSTRAK

Bank sentral memiliki peran krusial dalam perekonomian melalui pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar. Sebagai pengendali inflasi, bank sentral menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan pengaturan cadangan wajib guna mengendalikan jumlah uang beredar dan menyesuaikan permintaan agregat. Kebijakan moneter yang ketat diterapkan untuk menekan inflasi, sedangkan kebijakan ekspansif dilakukan dalam kondisi ekonomi yang lemah guna mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, dalam menjaga stabilitas nilai tukar, bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengurangi volatilitas nilai mata uang dan menjaga daya saing ekonomi. Dengan stabilitas harga dan nilai tukar yang terjaga, perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan dan terhindar dari ketidakpastian. Peran bank sentral menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika global dan domestik yang kompleks, serta membutuhkan koordinasi yang baik dengan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan makroekonomi yang optimal. Perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk pula di Indonesia tentu tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh oleh setiap negara yang bersangkutan. Tetapi kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh berbeda-beda oleh setiap negara bergantung kepada kondisi ekonomi riil, arah, dan tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal pada prinsipnya bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dan suku bunga yang cenderung semakin bertambah di masyarakat. Bank Indonesia merupakan lembaga independen yang memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sehingga nilai rupiah tetap stabil dan laju inflasi dapat dikendalikan dalam rangka menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kata kunci: moneter, inflasi, bank sentral

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter adalah instrumen ekonomi yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga guna mencapai kestabilan ekonomi makro. Tujuan utama dari kebijakan moneter meliputi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menekan tingkat pengangguran. Kebijakan ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif bertujuan meningkatkan likuiditas dengan menurunkan suku bunga dan memperluas penawaran uang, sementara kebijakan kontraktif dilakukan untuk menekan inflasi dengan cara menaikkan suku bunga dan mengurangi jumlah uang beredar. Dalam praktiknya, bank sentral menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga acuan, dan pengendalian cadangan minimum perbankan. Tujuan utama kebijakan moneter dalam perekonomian tradisional adalah stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan stabilitas sistem keuangan (Wayan Sudirman, 2017). Kebijakan moneter merupakan cara untuk mengendalikan inflasi. Perkembangan inflasi dipengaruhi

173

dipengaruhi oleh inflasi inti yang stabil di tengah permintaan domestik yang membaik, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target.

Kebijakan moneter dikeluarkan BI sebagai otoritas moneter di Indonesia. BI dalam menjaga kondisi perekonomian tetap tumbuh dan kondusif seringkali mengeluarkan kebijakan moneter yang berdampak kepada industri keuangan khususnya perbankan. Kebijakan moneter adalah salah satu kebijakan ekonomi makro yang berkaitan langsung dengan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter menggunakan peubah jumlah uang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interest rate) untuk mempengaruhi permintaan agregat dan mengendalikan ketidakstabilan perekonomian suatu negara. Dengan kebijakan moneter pemerintah dalam hal ini BI juga dapat mengendalikan jumlah uang beredar, kredit dan perbankan (Samuel, 2023). BI memegang peranan sebagai otoritas moneter di Indonesia. Di dalam kebijakan moneter, efektifitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output (pertumbuhan ekonomi), tingkat bunga, dan inflasi. Dari sejumlah literature, dapat dilihat berbagai temuan empiris yang menarik mengenai hubungan antara uang beredar, inflasi, tingkat bunga, dan output (Utami, 2019).

Dalam konteks perekonomian modern, kebijakan moneter menjadi salah satu alat utama untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Sebagai pengendali utama sektor moneter, bank sentral—seperti Bank Indonesia di Indonesia memainkan peran sentral dalam mengatur arus uang dan kredit di pasar. Kebijakan yang tepat dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat, sementara kebijakan yang kurang tepat dapat memicu inflasi tinggi, gejolak nilai tukar, atau krisis keuangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Deskripsi dalam arti peneliti berusaha mendeskripsikan secara sistematis dan akurat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian literature review. Dengan cara menelaah sejumlah artikel, buku-buku, jurnal dan teori dan konsep yang berhubungan dengan pembahasan ini. Dengan menggunakan metode dan teknik pengumpulan datatersebut, kiranya dapat terkumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk mendukung penulisan artikel ini, dapat pula menemukan suatu kesimpulan yang obyektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bank Sentral

Salah satu definisi bank sentral dalam arti sempit dimana bank sentral adalah bank tempat bank lain menempatkan dana (rekening) dan menggunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir transaksi antar bank. Bank sentral merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi variabel ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, bank sentral merupakan lembaga pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang terfokus pada bidangmoneter yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian yang terusberkembang akibat



permasalahan perekonomian yang semakin kompleks (Warjiyo, 2020). Bank sentral merupakan institusi dengan karakteristik dan kekhususan yang dibentuk menurut hukum. Pembahasan bank sentral tidak dapat lepas dari studi indisipliner antara hukum dan ekonomi. Hal tersebut karena kebijakan bank sentral didasarkan atas mandat hukum dan bertujuan untuk mengelola dinamika perekonomian, sehingga tidak terjadi fluktuasi ekstrem yang dapat mengganggu stabilitas. Bank sentral memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan yang bersifat countercyclical, yaitu suatu upaya proaktif untuk mengatasi pergerakan siklus ekonomi, baik dalam kondisi tumbuh pesat (boom) maupun jatuh melambat (bust). keberadaan bank sentral muncul ketika terdapat keraguan atas teori free market yang diusung oleh Adam Smith (the invisible hands). Kapitalisme yang mencerminkan kepentingan bersama pelaku pasar menurut Adam Smith dapat menjadi sistem disiplin bagi pasar.

Bank Sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Peranan Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrument dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan (Putra, 2015). Kebijakan moneter yang pada umumnya menempatkan dua indikator kebijakan moneter penting yakni suku bunga dan uang beredar. Akan tetapi, dalam keseharian perekonomian, hanya indikator suku bunga yang dapat dimonitor secara langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, lazimnya, masyarakat juga dapat melihat dan merasakan beberapa hal penting yang menjadi indikator dari stabilitas moneter. Sebagai tolak ukur stabilitas moneter diantaranya: a) laju inflasi pada tingkat yang cukup rendah, b) suku bunga pada tingkat wajar, c) nilai tukar rupiah yang realistik, d) ekspektasi masyarakat terhadap moneter. Keempat tolak ukur bisa dilihat sehari-hari dan dirasakan pengaruhnya oleh masyarakat. Perkembangan beberapa tolak ukur stabilitas moneter tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan perkembangan kegiatan perbankan yang sehat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang (secara umum) yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu. Inflasi sebagai proses kenaikan harga-harga barang secara umum dan menyeluruh secara terusmenerus. Kenaikan harga-harga yang terjadi hanya diwaktu tertentu atau tidak konstant tidak dapat dikatakan sebagai terjadinya inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Inflasi merupakan suatu peristiwa moneter yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai mata uang terhadap suatu barang tertentu, peristiwa ini menyebabkan gangguan terhadap fungsi uang, distorsi harga, merusak output, meruntuhkan efisiensi dan investasi produktif, serta menimbulkan ketidakadilan social (Mulyani, 2020). Tingkat inflasi yaitu presentasi kenaikan harga-harga



dalam suatu tahun tertentu, biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi yang kenaikan tersebut dinamakan hiperinflasi. Angka inflasi yang terlalu tinggi akan memberi dampak bagi masyarakat, yaitu pendapatan riil masyarakat akan berkurang. Dapat di ilustrasikan, ketika kita mempunyai uang Rp. 10.000,00 untuk dibelikan satu buah barang. Sebelum terjadi inflasi harga satu buah barang adalah Rp. 5.000,00 sehingga uang Rp. 10.000,00 tersebut bisa dibelikan dua buah barang. Akan tetapi setelah terjadi inflasi tinggi yang lama, maka harga satu buah barang naik menjadi Rp. 10.000. Maka dengan uang Rp.10.000,00. Kita hanya mendapatkan satu buah barang. Sehingga uang Rp. 10.000,00 yang kita punya tadi akan habis untuk membeli satu buah barang. Selain itu, dampak yang tidak terkendali lainnya adalah pelaku ekonomi tidak bisa memperkirakan kondisi ekonomi kedepannya. Seperti contohnya kita tidak bisa memastikan keuntungan yang kita dapat ketika menjual mie ayam saat harga-harga bahan baku tiba-tiba mengalami kenaikan (Mulyani, 2020).

Tingkat harga merupakan indikator penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Karena tingkat harga dapat menjaga keseimbangan dalam alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan indikator-indikator ini dan mendistorsi harga. Hal ini akan mempersulit perencanaan dan tidak menyebabkan menurunnya motivasi masyarakat maupun dunia usaha untuk menabung dan berinvestasi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata pada hakekatnya merupakan tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur tingkat kesejahteraan masyarakat, karena dapat menggambarkan secara riil keberhasilan pembangunan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat. Parameter untuk mengukur tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari adanya sumber daya manusia yang berkualitas (Tri wahyuni, 2021).

Ada beberapa penyebab inflasi, inflasi secara konvensional ada dua macam, yaitu: Inflasi tarikan penawaran (demand full inflation), dan inflasi desakan biaya (cost push inflation). Sedangkan menurut Islam ada 3 hal yang menyebabkan inflasi yakni: 1) natural inflation yaitu keadaan yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah, di mana orang tidak mempunyai kendali dalam menekan inflasi; 2) human error inflation, sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri; 3) emotional market, yaitu permintaan yang tinggi terhadap barang dan jasa karena isu-isu, kegiatan keagamaan, atau terkait dengan budaya dan perilaku. Akibat dari inflasi menyebabkan semakin buruknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi, dalam pandangan ekonomi Islam, Inflasi dapat menimbulkan gangguan, melemahnya semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, dan mengarahkan masyarakat untuk berinvestasi ke sektor non produktif. Karena itu untuk mencegah inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal, dan output yang dilakukan pemerintah dengan dibarengi perubahan perilaku moral Masyarakat (Lestari, 2018).

Bank sentral atau Bank Indonesia dan Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mencapai sasaran inflasi yang sudah ditetapkan melalui koordinasi kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya pengendalian inflasi menuju



inflasi yang rendah dan stabil adalah dengan membentuk dan mengarahkan ekspektasi inflasi masyarakat agar mengacu (anchor) pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sasaran inflasi ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sementara setelah UU tersebut, dalam rangka meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia maka sasaran inflasi ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan aggregate (demand management) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Dalam hal ini kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan modern pada beberapa jenis barang atau jasa di setiap kota. Bicara soal inflasi mau tidak mau harus melihatnya terhadap bentuk dari inflasi itu sendiri yaitu inflasi merayap dan inflasi yang terus menerus berkelanjutan dan dianggap serius apabila melewati batas 5 %, serta bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi inflasi jenis ini. Zero inflation atau inflasi pada nol persen menjadi harapan dan tujuan dari pemerintah dalam mengatasi sistem perekonomian nasional sangat sulit untuk bisa terwujud. Untuk menjaga stabilitas nasional di bidang ekonomi maka pemerintah perlu untuk menjaga tingkat inflasi jangan sampai melebihi 5 %. Salah satu upaya dari pemerintah guna mengatasi masalah inflasi ini adalah dengan melakukan kebijakan fiscal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dengan cara pengurangan pengeluaran pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian keuangan sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia (Wario, 1998).

Pelaksanaan kebijakan moneter yang dilakukan oleh dua institusi yang berbeda ini tidak boleh bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana keduanya haruslah saling menyesuaikan kebijakan yang dibuatnya. Salah satu tindakan yang harus diambil oleh Bank Indonesia dalam mengatasi masalah inflasi ini yaitu dengan cara mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga, di mana kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Sedangkan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian keuangan dalam bentuk kebijakan fiskal yaitu dengan cara mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan. Kedua langkah ini dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi dan mengurangi pengeluaran rumah tangga.

Hubungan kebijakan moneter, inflasi dan nilai tukar dalam peran Bank Sentral

Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, salah satu faktor terpenting bagi efektivitas kebijakan moneter adalah pemahaman mengenai terbentuknya ekspektasi inflasi oleh pelaku ekonomi serta faktor yang berpengaruh terhadap inflasi (Marimin, 2017). Dengan diperolehnya pemahaman tentang dua hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi:



- a. Pengendalian inflasi khususnya melalui kebijakan moneter
- b. Penentuan target inflasi yang diinginkan oleh pemerintah

Tolak ukur stabilitas moneter, diantaranya:

- a. Laju Inflasi
- b. Suku Bunga
- c. Nilai Tukar Mata Uang
- d. Ekspektasi Masyarakat

Tolak ukur stabilitas moneter yang dilihat dari inflasi mendorong Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan sebagai otoritas moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga, agar minat masyarakat untuk menabung tinggi, sehingga kondisi di sektor akan stabil dan tidak terjadi efek kenaikan harga yang tinggi. Kenaikan harga tinggi menyebabkan daya beli akan rendah dan tidak bergairahnya sektor riil sehingga perlu dilakukan stabilisasi dengan menaikkan tingkat suku bunga. Selain menjaga suku bunga, Bank Indonesia perlu menstabilkan dari sisi perubahan nilai tukar rupiah, agar tetap menjaga kestabilan harga-harga di dalam negeri dan faktor penarik bagi luar negeri. Memang ada kalanya nilai tukar rupiah yang rendah, dapat menarik dari sisi daya beli luar negeri dan memberikan dampak positif dalam pembangunan (Putra, 2015). Dalam arah kebijakan bidang moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan amandemen terahir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Terdapat dua dimensi mengenai kestabilan nilai rupiah, yaitu pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dalam konteks perkembangan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating).

Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar agar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia secara konsisten terus-menerus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Dengan mengatur suku bunga, jumlah uang beredar, dan intervensi di pasar, bank sentral memastikan stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, dan kelancaran kegiatan perdagangan. Kebijakan moneter juga merupakan alat penting bagi bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Melalui berbagai instrumen seperti suku bunga acuan, OPT, dan cadangan wajib minimum,



Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan likuiditas pasar. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada respons sektor keuangan dan dunia usaha serta kondisi ekonomi global. Selain itu, koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat penting agar kedua kebijakan dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, 'Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Hukum Ekonomi Islam', MIZAN Journal Of Islamic Law, 1.2 (2017)
- Bank Indonesia, Tujuan Kebijakan Moneter, artikel dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/> tujuan-kebijakan/ Contents/Default.aspx
- Fadhillah, Nur, 'Sejarah Kebijakan Moneter Dalam Islam', 8.1 (2022), 75–90
- Fuad, Ahmad, 'Kebijakan Moneter Islam', Jurnal Syariah, 8.1 (2020), 1–24
- Lestari, E. P., & Utami, I. W. S. (2019). *Kebijakan Target Inflasi Sebagai Sasaran Kebijakan Moneter Baru Bank Sentral*.
- Latifah, Nur Aini, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', 124–34
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. *PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA*. (2017) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1(02). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Mulyani, R. *Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam*. (2020)
- Marzuki, Sitti Nikmah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, and Negeri Watampone, 'Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam', 1.2 (2021), 201–16
- Mujiatun, Siti, 'Kebijakan Moneter Dan Fiskal Dalam Islam', Jurnal Ekonomikawan, Vol.14.No.1 (2015), 73–81
- Novitasari, Cindy, and Ray Dwiki Syahputra, 'Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', Al-Buhuts, 13.1 (2021), 1–25
- Putra, M. U. M. *Peran Dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian* (2015)
- Putra, Popi Adiyes, Rifki Ismail, and Andri Soemitra, 'Bauran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Perekonomian Dalam Perspektif Syariah', 6 (2023)
- Semuel, H. (2003). Penerapan Total Quality Management Suatu Evaluasi Melalui Karakteristik Kerja. Jurnal Manajemen,
- Sobarna, Nanang, 'Co-Management', Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ilmu Sosial, I.2 (2019), 175–82
- Syukriyyah, Jurnal Asy-, Irwan Maulana, and Ruslan Husein Marasabessy, 'Kebijakan Triwahyuni. *Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam*, 2021 *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2
- Utami, A. *Determinan Jumlah Uang Beredar, Tingkat Bunga, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*
- Warjiyo, P., & Juhro, S. M.. *Kebijakan Bank Sentral Teori dan Praktik*. 2020 PT RajaGrafindo Persada.
- Warjiyo, Perry dan Doddy Zulverdi, "Penggunaan Suku Bunga Sebagai Sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia" Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1, Nomor 1, Bank Indonesia, Jakarta Juli 1998.

